



Struktur Pemerintahan Palembang Syu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945

Imamatul Azizah¹, Riska Syafitri², Supriyanto³, Syarifuddin^{4*},

¹ Universitas Sriwijaya; imamatul.azizah@gmail.com

² Universitas Sriwijaya; riskasyafitri52@gmail.com

³ Universitas Sriwijaya; supriyanto.fkipsej@gmail.com

⁴ Universitas Sriwijaya; syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

*Korespondensi

Dikirim: 09-09-2021; Diterima: 02-12-2021; Diterbitkan: 30-12-2021

Abstract: This study discusses the government structure of Palembang during the Japanese occupation in 1942-1945, especially regarding the Syu government. The research method used is historical or historical research methods. The purpose of this research is to increase knowledge and dig deeper into the history of Palembang City and also to highlight the historical traces of the Palembang regional political system during the reign of Japan. This research is related to the Syu government system or called Residency. The results of this study are that before the Japanese came and colonized the archipelago, the Palembang area had rules made by the Dutch and customary law then Japan arrived in Sumatra and issued a new law called Seirei (Osamu Seirei), this rule book discusses military government, which levels consist of Syuugun (residence), Bansyuu (sub-residence), Gun (district), and Son (sub-district), the unique thing is that even though it seems to have changed, in fact, the constitutional structure is the same as the previous system but only changes in terms.

Keyword: Japan; Palembang; Syu

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang struktur pemerintahan Palembang pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 khususnya mengenai pemerintahan Syu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah atau historis. Tujuan dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan serta menggali lebih dalam mengenai sejarah di Kota Palembang juga mengangkat jejak historis dari sistem politik daerah Palembang saat berkuasanya Jepang. Penelitian ini terkait sistem pemerintahan Syu atau disebut Keresidenan. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum Jepang datang dan menjajah wilayah nusantara, daerah Palembang telah terdapat aturan yang dibuat Belanda serta hukum adat kemudian Jepang tiba di Sumatera dan mengeluarkan sebuah Undang-undang baru bernama Seirei (Osamu Seirei), kitab aturan ini membahas tentang pemerintahan militer, yang mana tingkatannya terdiri atas Syuugun (Karesidenan), Bansyuu (sub karesidenan), Gun (distrik), dan Son (subdistrik), uniknya walaupun terkesan berubah tetapi sebenarnya susunan ketatanegaraan ini sama dengan sistem sebelumnya namun hanya mengalami pergantian istilah.

Kata Kunci: Jepang, Palembang, Syu



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejarah terkait dengan pemerintahan di Palembang adalah salah satu kajian yang menarik sebab sistem pemerintahan kota Palembang terus mengalami perkembangan, awalnya pada era Kesultanan Palembang Darussalam terdapat sistem pemerintahan Kemargaan beserta kitab Simbur Cahaya (Syawaludin, 2016). Sistem pemerintahan tradisional kemudian mengalami perkembangan setelah masuknya kolonialisme ke kota Palembang namun sistem kemargaan tersebut tetap berlanjut dan keberadaannya diatur melalui *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* tahun 1938 No. 490 (Panji & Suriana, 2014). Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Belanda tidak begitu saja menghapuskan ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya (Hasan, 2012), begitu pula yang terjadi ketika Jepang menduduki kota Palembang.

Saat Jepang berhasil menguasai Palembang, para serdadu militer mulai menyebar ke berbagai wilayah dengan tujuan untuk menduduki Sumatera Selatan secara keseluruhan, di akhir bulan februari 1942 (setelah tujuan tersebut tercapai), pemerintahan militer Jepang pun mulai dijalankan dan begitu Jepang berkuasa daerah Palembang kemudian dimasukkan dalam pembentukan 10 Syu, dimana pada masa Belanda, Syu merupakan Keresidenan, pejabat yang mengemban posisi ini disebut dengan residen namun istilah pangkat tersebut berganti selepas Jepang mengambil alih, perubahannya yakni *syuu coka/syucoo* (Abdullah et al., 1984: 109).

Berlandaskan fakta tersebut dapat di ketahui bahwa, Jepang tidak banyak merubah peraturan yang telah dibuat Belanda serta tidak mengganggu hukum adat, sepanjang keberadaannya tidak buruk bagi rencana Perang Asia Timur Raya (Amaliatulwalidain, 2017). Tata pemerintahan daerah di masa pendudukan Jepang ini lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1942 (Nur & Djumarwan, 2019). Adapun perbedaan yang dapat dilihat pada masa pemerintahan Jepang dengan pemerintahan sebelumnya yaitu perubahan pada nama struktur pemerintahan, keistimewaan lainnya adalah terkait dengan bentuk pemerintahan yang lebih bersifat ke arah militer (Ramli & Bakaruddin, 2021).

Penelitian terdahulu terkait sistem pemerintahan masa pendudukan Jepang yakni artikel (Mita, 2020) dengan judul “Palembang Shi Pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945”, fokus yang dikaji berkaitan dengan Palembang Shi, selanjutnya artikel dengan judul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang” yang ditulis oleh (Fadki & Kumalasari, 2019), artikel ini lebih membahas mengenai sistem pemerintahan masa pendudukan Jepang di Indonesia secara umum. Kemudian artikel yang berjudul “Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik di Indonesia” (Amaliatulwalidain, 2017), kajiannya berkaitan dengan sistem pemerintahan desa dari masa tradisional, Belanda, Jepang, hingga berakhirnya Orba.

Ketiga artikel di atas membahas dan menyinggung mengenai sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada zaman Jepang. Akan tetapi pada artikel yang peneliti tulis kajiannya lebih terfokus pada struktur pemerintahan Palembang Syu. Adapun rumusan masalah mencakup apa yang membuat Jepang tertarik datang ke Palembang? Bagaimana perubahan pemerintahan saat Jepang berkuasa dan bagaimana struktur dari Palembang Syu. Tujuan dari

penelitian adalah untuk menggali sejarah Palembang pada masa pemerintahan Jepang, khususnya pembahasan terkait sistem pemerintahan Syu atau yang disebut dengan keresidenan. Oleh karena itu urgensi penelitian ini yakni tentang mengangkat jejak historis dari sistem politik daerah Palembang pasca berkuasanya Jepang dan penjabaran dari tulisan ilmiah ini akan banyak difokuskan pada struktur pemerintahan Syu tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah atau historis. Garraghan memaknai metode sejarah sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai (Herlina, 2020: 1). Dari pendapat Garraghan tersebut, dapat diartikan bahwa metode sejarah merupakan tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah yang bertujuan menghimpun sumber-sumber sejarah secara efektif.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan yaitu: heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi yang menitik beratkan pada studi kepustakaan (Kuntowijoyo, 2005). Pada tahap pertama (heuristik) penulis mengumpulkan sumber atau informasi dari artikel atau buku terkait tema penelitian. Tahap kedua (kritik) peneliti mulai mengkaji secara kritis sumber atau informasi yang didapat. Tahap ketiga (interpretasi) penulis menggali fakta sejarah untuk menentukan makna dari data yang diperoleh. Tahap terakhir (historiografi) peneliti menyambungkan interpretasi atas fakta yang diperoleh ke dalam karya ilmiah sejarah. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan politik dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Minyak Bumi Sebagai Sasaran Pendudukan Jepang di Palembang

Isolasi diri yang dilakukan Jepang berhasil didobrak oleh Amerika dan sejak 1868 akhirnya Jepang melakukan pembaharuan secara besar-besaran. Revolusi tersebut disebut dengan Restorasi Meiji, peristiwa ini ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Tokugawa dengan pemerintahan Bakufu-nya. Otoritas kemudian diserahkan pada kaisar (*Tenno*), yakni Mutsuhito. Transisi ini merupakan periode yang penting oleh karena itu zaman Meiji yang berlangsung dari 1868 sampai 1912 dianggap sebagai masa yang istimewa bagi sejarah kebangkitan Jepang (Wahyuni et al., 2018).

Sejak masa Meiji politik pemerintahan Jepang juga mulai berubah. Terutama kekuatan kementerian pertahanan (*gunbatsu*), Kekuasaan militer tersebut mempengaruhi ideologi negara menjadi berhaluan militeris. Tidak sampai disana perubahan terus terjadi pada pemerintahan dalam negeri Jepang, di tahun 1941 Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri, peralihan tersebut menyebabkan Jepang mulai memasuki gerbang Perang Dunia II (Mulyana et al., 2017).

Keikutsertaan Jepang dalam Perang Dunia II semakin menggebu, salah satu faktor penting yang mendorongnya yakni, kala itu Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi, dan seperti yang diketahui bahwa sumber daya alam tersebut merupakan suatu komoditas

yang sangat dibutuhkan, baik untuk industri maupun untuk keperluan perang Jepang, Maka negara ini mulai bersemangat dalam menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama pada kawasan Asia Tenggara (Arif, 2016: 1). Aspek berikutnya yang menyulut munculnya konflik bersenjata tersebut adalah perkembangannya ideologi fasis di Italia, Jerman dan Jepang (Maruta, 2015). Setelah memantapkan diri untuk turut serta sebagai anggota blok fasis dan perang dunia, Jepang kemudian memegang medan pertempuran pada wilayah Kawasan Asia-Pasifik (Darminto & Ridha, 2013).

Perang dikawasan Asia-Pasifik dikenal juga dengan nama perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 8 Desember 1941 (Handayani et al., 2018). Awalnya Jepang melakukan serangan kepada Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii dengan menggunakan pesawat terbang bunuh diri (*Kamikaze*) (Gunardo, 2007). Setelah penyerangan itu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda melalui jenderal Ter Poorten akhirnya menyerah tanpa syarat dan memberikan kekuasaan kepada Hitoshi Imamura di Kalijati, Jawa Barat (Yasmis, 2007).

Keberhasilan Jepang dalam menaklukkan Belanda ini tentunya karena strategi yang telah mereka susun, diketahui bahwa sebelum melakukan penyerangan. Jepang melancarkan kegiatan prakondisi melalui tindakan mata-mata (*Spionase*). Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan Indonesia yang sesungguhnya serta melakukan penyelidikan terkait daerah yang mempunyai potensi. Maka dari itu, penyerangan selanjutnya menuju daerah selatan terutama pada pusat-pusat minyak di Asia Tenggara dapat terlaksana dengan lancar, seperti yang telah disinggung sebelumnya, minyak ini menjadi target yang penting bagi Jepang karena sumber daya alam negeri mereka terbatas (Ishak, 2012).



Gambar 1. Mendaratnya Jepang ke Palembang

Sumber. <https://commons.wikimedia.org/>

Ketika tiba di Tanah Air, Jepang mengutamakan terlebih dahulu Palembang sebagai tempat pendudukan, karena kota ini sangat penting dan strategis. Melalui Palembang, Jepang

berencana untuk memisahkan pusat kedudukan Belanda di Indonesia yaitu Batavia (Jakarta) dengan pusat pendudukan Inggris (Singapura) (Saifudin & Saepuddin, 2020). Selain itu dengan menguasai Palembang Jepang dapat menjalankan mesin pendukung perangnya, sebab kawasan Sumatera Selatan ini kaya sumber daya alam, terutama minyak bumi dan bauksit (hasil alam yang diincar Jepang) (Febrian et al., 2015). Dalam usaha mengambil alih Palembang, Jepang melakukan penyerangan pada tanggal 14 Februari 1942 dengan mendaratkan pasukan payung akhirnya dengan upaya tersebut setelah dua hari kemudian Palembang berhasil diduduki (Safitri & Suryani, 2017).

Pemerintahan Militer Jepang di Sumatera

Saat masa-masa pendudukannya di nusantara pihak Jepang mengeluarkan sebuah undang-undang bernama *Seirei (Osamu Seirei)* yang membahas tentang pemerintahan (Dahlan, 2009). Salah satu pasal dalam kitab peraturan tersebut yakni Pasal 3 Nomor 1 Tahun 1942, menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum serta undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer (Bahiej, 2005). Kemudian untuk mengawasi wilayah nusantara yang teramat luas, Jepang mengatasinya dengan mengelompokkan daerah pendudukan ke dalam tiga area (Saputra, 2018).

Tabel 1. Pembagian Tiga Wilayah Nusantara Pada Masa Jepang

No	Pemerintahan Militer	Wilayah	Daerah Kedudukan
1.	Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Rikigun Kedua Puluh Lima)	Sumatra	Bukittinggi
2.	Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Rikigun Keenam Belas)	Jawa dan Madura	Jakarta
3.	Pemerintah Militer Angkatan Laut (Kaigun Armada Selatan Kedua)	Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku	Makassar.

Pada daerah Sumatera, Jepang juga membagi pasukan yang akan memerintah menjadi beberapa cabang (Muhajir et al., 2021).

Tabel 2. Pasukan Militer Yang Memerintah Pada Masa Jepang

No	Pasukan	Wilayah	Markas Besar
1.	Bala Tentara ke-25	Riau	Bukittinggi
2.	Divisi ke-2	Sumatera Timur dan Aceh	Medan
3.	Brigade ke-25	Tapanuli	Sibolga

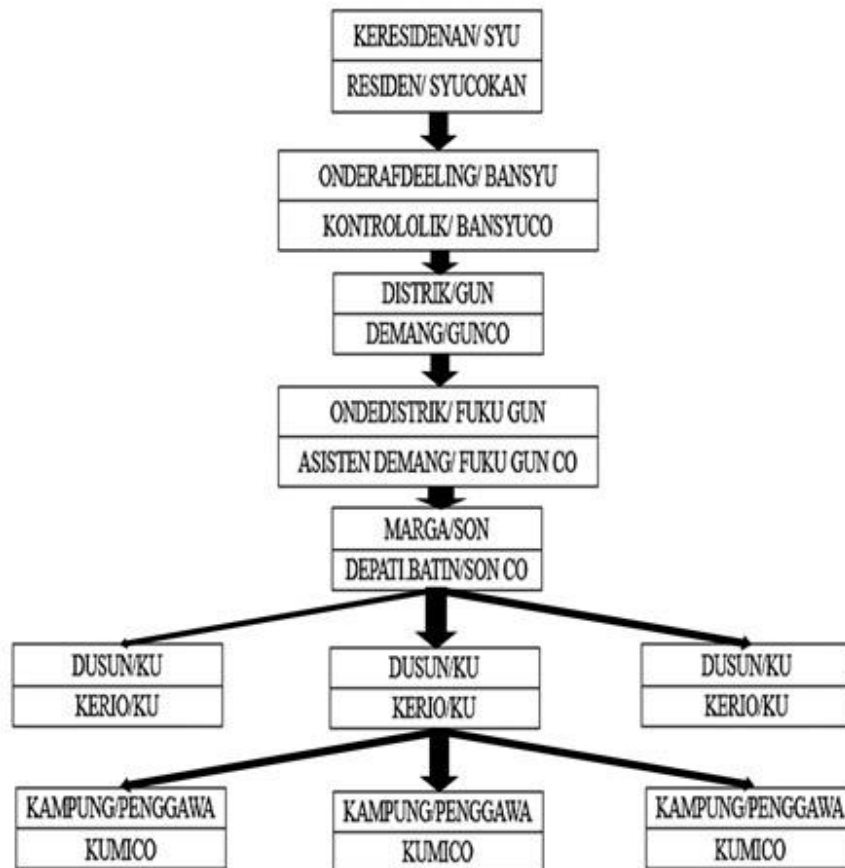
4.	Brigade ke-26	Jambi, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.	Lahat
5.	Divisi ke-4 (Yodo)	Sumatera Barat	Padang
6.	Divisi ke-9 Udara	Palembang dan tambang minyak Pkl. Brandan	Palembang

Sebagai komponen dalam pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-25). Sumatera dipecah kembali kedalam 10 Karesidenan (Syu), yaitu: Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Bangka, dan Belitung (Hermawan, 2018). Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa selama pemerintahannya pihak Jepang sebagian besar melaksanakan struktur administrasi pemerintahan yang telah disusun oleh Belanda namun dengan tambahan bahwa sifat dan polanya lebih otokratis (Berlian, 2003: 56). Walaupun pemerintah Jepang mempertahankan bentuk dari pemerintahan sebelumnya, akan tetapi Jepang tetap membubarkan organisasi sosial, politik, keagamaan yang tidak mau diajak bekerjasama (Murdi & Hadi, 2018).

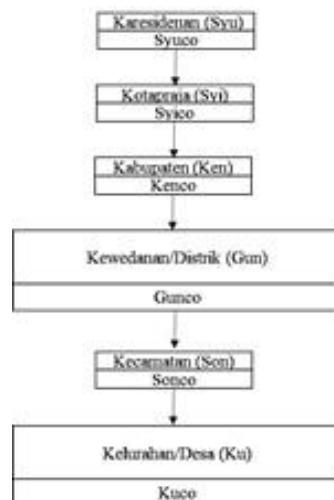
Susunan Ketatanegaraan Pemerintahan Jepang di Palembang

Selama pendudukannya di Nusantara, Jepang menerapkan hukum militer serta membangun berbagai instalasi militer seperti bunker (Nes, 2018), sebuah pemerintahan berbasis militer juga berusaha digagas pada masa dominasi Jepang, yang mana tingkatannya birokrasinya terdiri atas *Syuugun* (karesidenan), *Bansyuu* (sub karesidenan), *Gun* (distrik), dan *Son* (subdistrik). Dikarenakan Palembang termasuk kedalam 10 Syu, maka struktur pemerintahan Kota Palembang bentuknya seperti uraian diatas disamping itu pada Kota Palembang terdapat pula Syi yang dipimpin *Syicoo* (walikota), Palembang Syi ini disebut juga dengan kotapraja serta administrasinya dalam Syu berada langsung dibawah *Syucoo* (Ma'moen, 1991: 155). Berikut ini merupakan skema dari susunan pemerintahan Palembang Syu masa militer Jepang (Hanafiah, 1998: 110).

Gambar 2. Struktur Pemerintahan Palembang Syu



Selain dari pada sketsa diatas, terdapat pendapat lainnya tentang tingkat hirarkis pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan (Poesponegoro & Nugroho, 2008: 19).



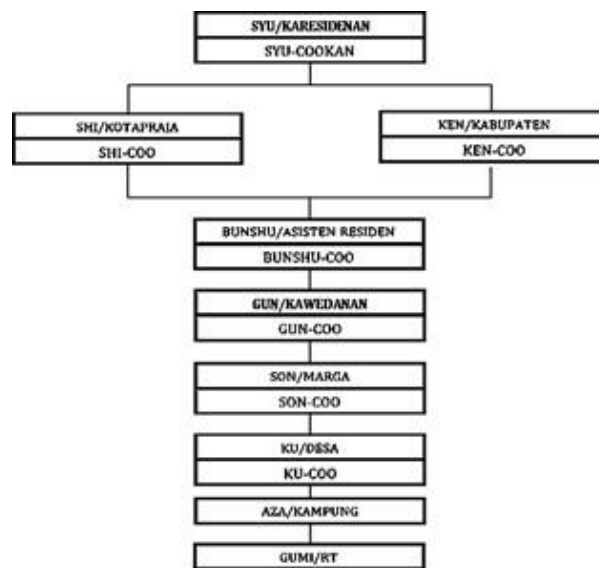
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Syu

Untuk melaksanakan tugasnya, *Syucokan* (kepala pemerintahan Syu) dibantu oleh Cokan Kanbo dengan tiga bagian yaitu; 1). *Naiseibu* (pemerintahan umum), 2). *Keizaibu* (Ekonomi), 3). *Keisatsubu* (kepolisian) (Poesponegoro & Nugroho, 2008: 20). Urutan unit pemerintahan Jepang ini telah ditegaskan dalam undang-undang No. 27 tahun 1942, yang mana rinciannya sebagai berikut; Pasal 2: Daerah Syu sama dengan residen dahulu; Pasal 3: Daerah Syu dibagi atas *Syi* dan *Ken*. Daerah *Ken* terbagi atas *Gun*, dan daerah *Gun* terbagi atas *Son*, dan *Ku* sama dengan distrik, onderdistrict, dan desa (Thresnawaty, 2009).

Seperti keterangan sebelumnya bawah dari Syu ada yang disebut *Bun Syuu*, biro ini terbagi dalam beberapa *gun* (kawedanan), sedangkan *gun* terdiri dari fuku *gun* dan fuku *gun* terbagi dalam beberapa *son* (marga) yang membawahi *ku* (dusun) (Abdullah et al., 1984: 56). Salah satu contoh dari *Ban syuu* di Sumatera Selatan yakni Bunsyu Musikami Rawas dengan ibukotanya yaitu Lubuklinggau (Ravico & Susetyo, 2020).

Berlandaskan penjelasan di atas, ditemukan hal unik dalam sistem yang berlaku di masa Jepang, yang mana seorang kepala *gun* (setingkat *onderafdeeling* pada zaman Belanda) dipegang oleh para wedana (pamong praja bumiputera), keadaan tersebut berbeda dengan saat Belanda menduduki Palembang karena jabatan ini biasanya diambil alih oleh orang Belanda (Santun et al., 2010: 34). Namun pendapat lainnya menjelaskan bahwa sebenarnya Jepang dalam pemerintahan juga tidak mengikutsertakan pribumi seperti yang Belanda lakukan tetapi keadaan mulai berubah setelah situasi perang mulai tidak menguntungkan (Basri, 1996: 21).

Pemerintahan Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan terkait Palembang *Syi* (Kotapraja Palembang), kawasan yang ditetapkan sebagai *Syi* merupakan daerah yang termasuk kotapraja pada masa Belanda dan karena Palembang adalah wilayah *Gameente* saat Belanda berkuasa maka kota Palembang ditetapkan sebagai daerah *Syi*. Perlu ditegaskan bahwa *Syi* berkuasa di ibukota keresidenan sementara untuk *Ken* berada di luar ibukota. Jabatan *Syicoo* (Walikota) dipegang oleh orang-orang Jepang dengan didampingi oleh asisten, Para pejabat *Syi* akan bertanggung jawab langsung kepada *Syucokan* (pemimpin Syu). Karena memiliki kedudukan special dalam struktur Syu, maka jika dijabarkan stratanya akan menjadi sebagai berikut (Mita, 2020).



Gambar 3. Struktur Pemerintahan Palembang Syu dengan Syi didalamnya

Pada bagian pendahuluan telah disinggung, sebelum Jepang datang dan menjajah wilayah nusantara khususnya Palembang, terdapat sebuah sistem pemerintahan tradisional yang biasa disebut dengan marga, Istilah marga pun berganti menjadi *Son* pasca berkedudukannya Jepang di kota Palembang dan kepala pesirah (pemimpin marga) dikenal dengan *Soncoo* lalu dusun berganti nama menjadi *Ku* sedangkan kepala kerio menjadi *buncoo* (Ismail, 2004: 42).

Melalui marga pemerintahan Jepang memanfaatkan kedudukan pesirah untuk mengumpulkan bahan makanan dan tenaga kerja dari rakyat dengan cara paksa, mereka juga akan mendapatkan ancaman dari polisi rahasia (*kepetai*) apabila tidak bersedia membantu Jepang (Muslimin, 1986: 45). Para penduduk marga yang telah dikumpulkan oleh pesirah akan masuk dalam Badan Pembantu Pemerintah (BPP), mereka ini akan diberikan tugas berupa proyek pemerintah, seperti pekerjaan konstruksi di tempat umum dan gedung-gedung pemerintahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta perbaikannya instalasi bunker (Melber, 2016). Selain dari desakan untuk memberikan tenaga kerja paksa pihak Jepang juga meminta para kepala marga untuk memberikan dua orang gadis pribumi yang nantinya akan dijadikan wanita penghibur (Geisha) (Padila, 2013).

Pada wilayah Sumatera bagian Selatan yang mencakup Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Lampung terdapat sebuah pendidikan militer yang disebut *Gyugun Kanbu*, akademi ini bertugas melatih para pemuda pribumi untuk menjadi seorang perwira militer yang akan menghadapi pertempuran. Dalam perkembangan berikutnya *Gyugun* akan menjadi pelopor dalam berdirinya BKR (TKR) di Sumatera Selatan (Pahlevi et al., 2020). *Gyugun* sendiri adalah singkatan dari *Gyu* dan *Gun*, *Gyu* artinya sukarelawan dan *Gun* artinya korps/tentara, jadi *Gyugun* dapat diartikan sebagai Korps Tentara Sukarela (Asmara & Henriko, 2020).

Terdapat tiga satuan latihan dalam sekolah militer *Gyugun* yang bermarkas di Pagaralam (Nopansyah et al., 2017).

Tabel 4. Satuan Latihan dalam Sekolah *Gyugun*

No	Satuan Latihan dalam Gyugun	Asal Peserta
1.	<i>Ichi Syotai</i> (Satuan Satu)	Palembang, Bangka, dan Belitung
2.	<i>Ni Syotai</i> (Satuan Dua)	Bengkulu dan Jambi
3.	<i>San Syotai</i> (Satuan Tiga)	lampung dan sebagian Jambi

Para pendaftar *Gyugun* kebanyakan datang dari anak dan keluarga pasirah (kepala marga) di uluan Palembang, anggota lainnya ada juga yang datang dari para guru serta pegawai minyak di BPM Plaju. *Gyugun* ini terbagi atas angkatan darat, angkatan udara dan *Gyugun Kikan* sebagai bagian intelijen militer. Anggota *Gyugun* diberi pangkat sesuai jenjang ijazah sekolah terakhirnya yaitu; lulusan MULO diberi pangkat *Gyu-Syoi* (letnan dua), alumni HIS diberi pangkat *Gyu ju-ni* (pembantu letnan) (Abubakar et al., 2020: 128).

Struktur terkecil dalam pemerintahan *Syu* selain dari *Son* adalah *Gumi* atau yang kita kenal dengan istilah RT. *Gun, Sen, Ku, Aza dan Gumi* semuanya bertanggung jawab ke pada *Syico*. Kemudian untuk jabatan *Gunco, Sonco, Kucoo, Aza* serta *Gumi* semuanya dijabat oleh pribumi dengan kriteria untuk *Guncoo* dan *Sonco* harus berasal dari elit tradisonal lokal setempat seperti anak bangsawan, anak Pasirah, Pembarab dan sebagainya (Mita, 2020).

Adanya penduduk pribumi dalam pemerintahan masa penjajahan Jepang dapat dilihat pula dari daftar nama para pejabat *Gun* atau yang berpangkat *Gunco* (Basri, 1996: 125).

Tabel 5. Nama Pejabat *Gunco*

No	Nama	Daerah yang Dipimpin
1.	R. A. Rachman Bakri	Palembang dan Banyasin
2.	R. M. Azahari	Ogan Ilir
3.	Oemar Hasan	Komering Ilir
4.	A. Rozak	Lematang Ilir
5.	Mgs. M. Yusup	Lematang Ulu
6.	M. Said	Tebing Tinggi
7.	A. Bakir	Rawas
8.	Ibrahim	Ogan Ulu
9.	M. Yunus	Komering Ulu

Menurut buku Sejarah Perkembangan Pemerintah di Daerah Sumatera Selatan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I. Pejabat *Gunco* berasal dari Pamong Praja Bumi Putera (Demang atau Asisten Demang) kemudian untuk *Syicoo* pada awalnya diemban oleh orang pribumi bernama Ir. Ibrahim Zahir, namun belakangan digantikan oleh orang Jepang,

selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1945 Jepang membentuk Sumatera *Co-Sangi-In* yang mana pada setiap *Syu* terdapat *Syu Sangikai*, untuk ketua *Syu-Sangikai* dari Palembang *Syu* yaitu Dr. A. K. Gani sedangkan wakilnya adalah Abdul Rozak (Basri, 1996: 125-127).

Kesimpulan

Salah satu sejarah lokal yang patut dipelajari yakni terkait dengan sistem pemerintahan di Palembang, kajian ini menjadi menarik sebab keberadaannya telah ada sejak masa kesultanan. Artikel ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada masa pemerintahan Jepang dengan kepemimpinan sebelumnya yaitu perubahan pada nama struktur pemerintahan, selain dari perubahan nama tersebut keistimewaan lainnya seperti bentuk pemerintahan yang bersifat ke arah militer. Penelitian ini menggambarkan jejak historis dari sistem politik daerah Palembang pasca berkuasanya Jepang. Kendati Jepang sangat terkenal dengan strategi serta sistem militer yang hebat mereka sangat baik dalam struktur pemerintahannya. Hal ini terlihat dimana Susunan Ketatanegaraan Pemerintahan Jepang di Palembang Sebuah pemerintahan militer berusaha digagas pada masa dominasi Jepang, yang mana tingkatannya terdiri atas *Syuugun* (karesidenan), *Bansyuu* (sub karesidenan), *Gun* (distrik), dan *Son* (subdistrik). Hal unik dalam sistem yang berlaku di masa Jepang seorang kepala *Gun* (setingkat *onderafdeeling* pada zaman Belanda) dipegang oleh para wedana (pamong praja bumiputera) berbeda dengan Belanda menduduki Palembang karena jabatan ini biasanya diambil alih oleh orang Belanda.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya peneliti diberi nikmat berupa kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih turut peneliti utarakan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan arahan dalam penelitian ini terutama kepada para sejarawan Palembang yakni; Dr. Dedi Irwanto, M.A. dan Kemas Ari Panji, S.Pd., M.Si. Tidak lupa ucapan terima kasih peneliti juga berikan kepada Desty Lylyatmi, S.Pd. dan Rani Oktapiani, S.Pd. atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.

Daftar Rujukan

- Abdullah, et al. (1984). *Mardanas Kota Palembang Sebagai "Kota Dagang dan Industri"*. Jakarta: Depdikbud
- Abubakar et al. (2020). *Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan Heritage di Sumatera Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Amaliatulwalidain. (2017). Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 25–30.
- Arif, M. (2016). *Revolusi Nasional Indonesia Perspektif Pendidikan Karakter Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Para Cita Press
- Asmara, D., & Henriko, R. (2020). Kolonel (Purn). S. B. Mansoersami Prajurit Gyugun Sumatera Barat. Kaganga: *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 3(1), 48-61.
- Bahiej, A. (2005). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Sosio-Religia*, 4(4), 1–21.

- Basri, R.H., & Soemarsono. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintah di Daerah Sumatera Selatan*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.
- Berlian, S. (2003). *Ogan Kemering Ilir Dalam Lintas Sejarah*. Kayuagung: Pemkab OKI
- Dahlan, M. H. (2009). Sejarah Lampung Utara (Periode Pembangunan Masa Orde Baru). *Patanjala*, 1(3), 258-271.
- Darminto, A. R., & Ridha, R. (2013). *Pendudukan Jepang di Pulau Lakkang Makassar 1942-1945*. 5(2), 10–16.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.
- Febrian, E., Hasan, Y., & Wargadalem, F. R. (2015). Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa di Palembang Pasca Kesultanan Palembang (1852-1942) (Sumbangan Materi Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Negeri 33 Palembang). *Jurnal Criksetra*, 4(1).
- Gunardo, G. (2007). Amerika Serikat Mencari Ruang Hidup di Seluruh Dunia. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 5(1).
- Hanafiah, D. (1988). *82 Tahun Pemerintahan Kota Palembang*. Palembang: Humas Kotamadya Daerah TK. II Palembang.
- Handayani, M. S., Abidin, Z., & Wardah, E. S. (2018). Keterlibatan Md. Juhdi Ma'mur Dalam Organisasi Pembela Tanah Air (Peta) Di Banten Tahun 1943-1945. *Tsaqofah*, 16(1), 70-79.
- Hasan, N. (2021). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1073-1087.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika
- Hermawan, I., & Barat, B. A. J. (2017). Persebaran Bangunan Pertahanan Jepang di Telukbetung Kota Bandar Lampung (The Distribution of Japanese Defense Structures in Telukbetung, Bandar Lampung City). *Berkala Arkeologi Sangkhakala*. 20(2), 88-99
- <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=japan+in+palembang&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image>. Diakses pada tanggal 06, Oktober 2021
- Husna, et al. (2019). Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 12-21.
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1-12
- Ismail, A. M. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press Palembang.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Ma'moen, A. (1991) *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maruta, H. (2015). Fasisme. *Iqtishaduna*, 4(1), 15–24.
- Melber, T. (2016). The Labour Recruitment of Local Inhabitants as Rōmusha in Japanese-Occupied South East Asia. *International Review of Social History*, 61(S24), 165-185.
- Mita, A. (2019). Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945.

Lembaran Sejarah, 15(2), 103-120.

- Muhajir, dkk. (2021). Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 149-158.
- Mulyana, et al. (2017). Kaisar Amerika di Negeri Sakura: Peranan Douglas Macarthur Dalam Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dunia II. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(2).
- Murdi, L., & Hadi, M. S. (2018). Dinamika Perjuangan Kaum Muslim dalam Mencapai Kemerdekaan Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 2(2), 183-204.
- Muslimin, A. (1986). *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Pemprov Sumsel
- Nes, M. R. (2018). Tipologi Instalasi Militer Jepang di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Siddhayatra*, 23(2), 102-113
- Nopansyah, P., Sair, A., & Farida, F. (2018). Peranan Perwira Gyugun dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Palembang pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 60-74
- Nur, P. I., & Djumarwan, D. (2019). Peran Polisi Dalam Pertahanan Kemerdekaan Ii Tahun 1948-1949 Di Surakarta. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 1(1), 58-69.
- Padila. (2013). Peranan Ulama Dalam Perkembangan Islam Di Ogan Ilir. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).
- Pahlevi, M. R. (2020). Peran Kabupaten Lahat dalam Revolusi Fisik di Sumatera Selatan Tahun 1947-1949. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 167-177.
- Panji, K. A., & Suriana, S. (2014). Sejarah Keresidenan Palembang. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 14(2), 129-146.
- Poesponegoro, et al. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Ramli, S., & Bakaruddin, L. (2021). Perubahan Birokrasi Pemerintahan Daerah Kewedanaan Rawas 1943-1950. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 25-33.
- Ravico, R. (2020). Merekonstruksi Sejarah SUB Komandemen Sumatera Selatan. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 20(1), 1-14.
- Safitri, M., & Suryani, I. (2018). Kesaksian Vivian Bullwinkle Sebagai Korban Kekejaman Jepang di Pulau Bangka Pada Tahun 1942 Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 3(1), 94-103.
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164.
- Santun, D. I. M., & Munir, Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher
- Saputra, A. (2018). Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusha di Indonesia. *Jurnal*

Renaissance, 3(2), 419-432.

Syawaludin, M. (2016). Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 175–198.

Thresnawaty, E. (2009). Lintasan Sejarah Pemerintahan Kabupaten Serang Abad XVI-XX. *Patanjala*, 1(2), 175-187.

Wahyuni, S, et al. (2018). Perkembangan Pendidikan di Negara Jepang Pasca Perang Dunia II dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal CANDI*, 18(2), 97-109

Yasmis. (2007). Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24–32.